

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan akan menghadapi risiko atau ketidakpastian yang tidak bisa dihilangkan dalam melakukan aktivitas bisnis. Lingkungan perusahaan yang berkembang pesat mengakibatkan risiko bisnis yang harus dihadapi semakin kompleks. Perkembangan transaksi dan teknologi, serta pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab semakin tinggi tantangan yang harus dihadapi perusahaan dalam mengelola risiko yang dihadapi. Akibatnya, untuk menghadapi tantangan tersebut perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang baik atau disebut *Enterprise Risk Management*.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Comissions* (2004) : *Enterprise Risk Management* adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel entitas lainnya, yang diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat memengaruhi entitas, dan mengelola risiko agar berada dalam selera risikonya, untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan entitas.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) : *Enterprise Risk Management* adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.

Menurut Sinaga dan Muslih (2018) : *Enterprise Risk Management* merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengevaluasi semua risiko dalam perusahaan yang dipengaruhi jajaran direktur entitas, manajemen dan personel lain, sebagai salah satu disiplin yang mengajak untuk konsisten, logis, serta sistematis, yang melakukan pendekatan pada ketidakpastian dimasa yang akan datang. Dalam laporan tahunan pengungkapan manajemen risiko menjadi salah satu acuan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi, pentingnya transparansi informasi pada laporan tahunan yang diterbitkan adalah karena hasil kinerja perusahaan dapat dicerminkan dalam laporan keuangan yang pengungkapannya ada pada laporan tahunan.

Namun dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan belum menerapkan *Enterprise Risk Management* secara baik dan menyeluruh. Di Indonesia sendiri, penerapan *Enterprise Risk Management* baru ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Lembaga Bank, sehingga perusahaan non-bank baik keuangan maupun keuangan belum menerapkan *Enterprise Risk Management*. Hal ini menyebabkan seringkali terjadi kecurangan-kecurangan akibat tidak mampunya perusahaan dalam mengelola risiko yang dihadapi, segala cara dilakukan agar perusahaan tetap dapat

dipandang positif dan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Berikut adalah fenomena perusahaan yang tidak dapat mengelola risiko perusahaan yang dihadapi.

PT. Showa Indonesia Manufacturing merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi *shock absorber* untuk roda dua dan empat. Dalam menghadapi permintaan pelanggan, PT Showa menggunakan sistem *by order* dan stock. Untuk merencanakan kebutuhan materialnya, perusahaan menggunakan *purchase order* untuk menjaga kesesuaian dengan pesanan dan tidak membuang barang jadi maupun bahan mentah. Namun dalam kenyataannya pada tahun 2018 ditemukan pada perusahaan masih terjadi *overstock* dan *outstanding material*. Hal ini disebabkan karena tren pasar yang berubah-ubah sehingga perusahaan perlu mengubah barang yang akan diproses, barang yang sudah jadi sebelumnya pun menjadi kurang laku dan tidak ada solusi yang dapat dilakukan untuk barang yang sudah jadi tersebut. Selain itu hal ini juga dikarenakan bahan baku dari *supplier* yang terlambat untuk tiba sedangkan perusahaan tidak memiliki cadangan bahan baku yang cukup untuk memproduksi. Selain itu juga, dikarenakan adanya *additional order* serta kurangnya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan dalam perusahaan belum mampu untuk menghadapi risiko operasional sehingga hasil riil tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selain itu perusahaan juga berusaha sebaik mungkin menghadapi risiko pasar, namun hasil barang jadi yang tidak sesuai dengan kondisi pasar dibiarkan begitu saja.

Selain itu, selama dua tahun kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB nasional memang terus menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut di tahun 2018, sektor ini hanya berkontribusi 19,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 14.837 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya industri manufaktur menyumbang 21,22% dari PDB RI sebesar Rp 13,588 triliun. Salah satu penyebab terbesar adalah sub sektor makanan, minuman, dan rokok. Salah satunya adalah PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk. mengalami penurunan penghasilan perusahaan lain-lain yang hanya mendapatkan keuntungan dari bentuk transaksi berupa transaksi daripada penjualan aset pada kategori spreads. Selain itu, perusahaan juga menaikkan biaya pemasaran sehingga laba laba serta nilai saham perusahaan ini semakin turun. Lalu ada sub sektor rokok yaitu PT HM Sampoerna Tbk. dan PT Gudang Garam pun mengalami penurunan harga saham. Hal ini disebabkan oleh naiknya bea cukai untuk rokok. Secara umum, penurunan harga saham ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang semakin turun, tren pasar yang berubah ubah, aturan baru yang ditetapkan, serta kelangkaan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa pada sektor manufaktur, perusahaan-perusahaan belum mampu untuk menghadapi risiko-risiko yang dihadapi, baik risiko operasional maupun risiko pasar dan lingkungan. Hal ini juga menunjukkan belum adanya penerapan manajemen risiko atau *enterprise risk management* yang baik dalam perusahaan.

Pentingnya *Enterprise Risk Management* bagi perusahaan tentunya merupakan pertimbangan bagi pihak-pihak penting dalam perusahaan, salah satunya adalah dewan

komisaris. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan rapat umum pemegang saham, serta peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *Enterprise Risk Management* adalah *Risk Management Committee* (RMC). *Risk Management Committee* atau komite manajemen risiko merupakan organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan, serta tugas dan fungsi *Risk Management Committee* juga menetapkan kebijakan strategi untuk membantu dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi juga menilai toleransi risiko dari suatu perusahaan. Sehingga *Risk Management Committee* mampu meningkatkan penerapan *Enterprise Risk Management*.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi *Enterprise Risk Management* adalah tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) : *Corporate Governance* dengan pencapaian keberhasilan usaha dan juga cara untuk memantau kinerja pencapaian sasaran keberhasilan ushaa tersebut. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate*

Governance menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, auditor eksternal, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*.

Menurut Zarkasyi (2008, 36) : *Corporate Governance* adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi, demi terciptanya tujuan perusahaan.

Manajemen risiko yang baik dapat dilihat dari implementasi *Good Corporate Governance* atau tata pengelolaan perusahaan yang baik. Organisasi yang mempraktekan *Good Corporate Governance* secara optimal akan cenderung membuat tingkat kepercayaan para investor meningkat, sehingga berimplikasi mereka dapat menggelontorkan dananya ke perusahaan tersebut.

Berdasarkan data *Asian Corporate Governance Association (ACGA)* pada tabel 1.1, peringkat Indonesia pada tahun 2014-2018 perihal penerapan *Corporate Governance* diantara negara-negara kawasan asia lainnya pada periode tiga tahun berturut-turut selalu berada diurutan terbawah.

Tabel 1.1

Score Corporate Governance dari Watchmarket 2016 – 2018

No	%	2014	2016	2018
1	Australia	-	78	71

2	Singapura	64	67	59
3	Hongkong	65	65	59
4	Jepang	60	63	54
5	Taiwan	56	60	56
6	Thailand	58	58	55
7	Malaysia	58	56	58
8	India	54	55	54
9	Korea	49	52	46
10	Cina	45	43	41
11	Philipina	40	38	37
12	Indonesia	39	36	34

Oleh Karena nilai *Good Corporate Governance* Indonesia yang rendah, maka terdapat risiko yang lebih besar dalam berinvestasi di Indonesia dibandingkan negara lainnya. Upaya-upaya nyata untuk mengurangi risiko yang ada sangatlah diperlukan. Salah satunya, perusahaan harus mulai mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengevaluasi setiap aktivitasnya dengan menggunakan manajemen risiko, yang banyak dikenal dengan nama Enterprise Risk Management (Adam et.all., 2016). Dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan dan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Penelitian mengenai ukuran dewan komisaris pernah dilakukan Ardiansyah dan Adnan (2014) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dengan 55 perusahaan sebagai sampel akhir, ditemukan hasil penelitian bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk*

Management, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas *Enterprise Risk Management*. Dewan direksi adalah sekumpulan eksekutif yang bertanggungjawab dalam pengawasan aktivitas presiden dan manajer-manajer tingkat atas perusahaan. Menurut Beasley (dalam Golshan 2012) : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap implementasi *Enterprise Risk Management* dalam perusahaan. Semakin banyak dewan direksi, maka semakin perusahaan harus menerapkan *Enterprise Risk Management*. Menurut Nuryaman (2009) : Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi apabila sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relative dominan dibandingkan dengan lainnya. Ada beberapa cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko, yaitu salah satunya memastikan adanya pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan dengan minimal satu pemegang saham besar.

Beberapa peneliti terdahulu, telah meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Namun menghasilkan penelitian yang tidak konsisten. Berikut adalah beberapa penelitian beserta kesimpulannya.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Ukuran Dewan Komisaris	Risk Management Committee	Ukuran Dewan Direksi	Konsentrasi Kepemilikan

1	PENGARUH <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017) – Pratiwi Ismi Giarti, 2019	-	X	✓	✓
2	PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN <i>RISK MANAGEMENT COMMITTEE</i> TERHADAP PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i> – Denia Ratnasari, dkk. 2019	✓	✓	-	-
3	PENGARUH STRUKTUR <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DALAM PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar pada BEI Periode 2015-2017) – Ali Gani, 2019.	-	✓	X	-
4	PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> , DAN UKURAN PERUSAHAAN, TERHADAP PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i> – Indah Anisykurlillah, 2016.	-	X	-	✓
5	PENGARUH DEWAN KOMISARIS, <i>LEVERAGE</i> , DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN				

	<i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)</i> – Jetmi Ade Cecasmi, 2019	✓	-	-	X
6	PENGARUH <i>CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE</i> DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN PADA PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i> – Gissel Glenda Agista, 2017	X	✓	-	✓

Keterangan :

- : Tidak Diuji

X : Tidak Signifikan

✓ : Signifikan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi Ismi Giarti (2019), peneliti menyimpulkan berdasarkan analisis dari variabel independen komisaris independe, dewan direksi, RMC, reputasi auditor dan konsentrasi kepemilikan terhadap variabel dependen *Enterprise Risk Manament (ERM)* pada 30 perusahaan perusahaan keluarga di BEI 2015-2017 yang telah memenuhi kriteria yang telah disyaratkan. Dapat ditunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Variabel bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. Kemudian *Risk Management Committee (RMC)* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Serta Reputasi Aditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Dan konsentrasi kepemilikan pada perusahaan mempengaruhi pengungkapan ERM, akan tetapi hal tersebut tidak terbukti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Denia Ratnasari et al., (2019), peneliti menyimpulkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris dan *Risk Management Committee* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Sementara Ukuran Dewan Komisaris dan *Risk Management Committee* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ali Gani (2019), peneliti menyimpulkan bahwa *Risk Management Committee* memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan ERM. Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ERM. Reputasi Auditor juga memiliki efek positif yang signifikan pada pengungkapan ERM. Ukuran Dewan Direksi memiliki efek negatif dan signifikan untuk pengungkapan ERM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Anisykurlillah (2016), peneliti menyimpulkan bahwa Reputasi Auditor dan Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Sedangkan keberadaan *Risk Management Committee* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Jetmi Ade Cecasmi (2019), peneliti menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. *Leverage and Ownership*

Structure tidak berpengaruh signifikan pada Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Gissel Glenda Agista (2017), peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komisaris independen pada luas pengungkapan ERM. RMC berpengaruh signifikan positif pada luas pengungkapan ERM. CRO berpengaruh signifikan positif pada luas pengungkapan ERM. konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif pada luas pengungkapan ERM.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pratsi Ismi Giarti (2019), Denia Ratnasari et al.. (2019), Ali Gani (2019), Indah Anisykurillah (2019), Jetmi Ade Cecasmi (2019), dan Gissel Glenda Agista (2017). Penelitian ini menggabungkan variabel tertentu dari penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dikembangkan dan dibuktikan karena terdapat beberapa perbedaan dari hasil pengujian yang terdahulu, serta sektor yang diteliti dengan periode yang berbeda pula. Alasan peneliti hanya menggunakan tiga sub variabel pada variabel Struktur *Good Corporate Governance* adalah karena ketiga sub variabel tersebut merupakan sub variabel yang paling berpengaruh dalam Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Ditambah dengan kondisi global yang tengah menghadapi Teknologi Industri 4.0, sehingga terdapat perbedaan judul dan metode penelitiannya.

Berdasarkan fenomena *gap* dan *research gap* yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sektor Manufaktur dengan penelitian yang

berjudul “**Pengaruh *Risk Management Committee*, dan Struktur *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Risiko operasional yang terjadi berakibat fatal namun penanganan yang diberikan tidak sesuai dengan akibat kejadian tersebut.
2. Terjadi penurunan harga saham akibat risiko lingkungan. Hal ini malah meningkatkan risiko pasar.
3. Belum adanya praktik *Good Corporate Governance* serta penetapan *Risk Management Committee* yang membuat manajemen dapat mengatasi risiko yang terjadi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *risk management committee* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
2. Bagaimana ukuran dewan komisaris pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Bagaimana ukuran dewan direksi pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
4. Bagaimana konsentrasi kepemilikan pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
5. Bagaimana *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
6. Seberapa besar pengaruh *risk management committee* terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
7. Seberapa besar pengaruh ukuran dewan komisaris positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
8. Seberapa besar pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
9. Seberapa besar pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *risk management committee* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui dewan komisaris pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui dewan direksi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
4. Untuk mengetahui konsentrasi kepemilikan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
5. Untuk mengetahui *enterprise risk management* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *risk management committee* terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur periode 2017-2019.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur periode 2017-2019.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur periode 2017-2019.

9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan sektor Manufaktur periode 2017-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi yang membahas akuntansi manajemen khususnya mengenai topik atau judul pengaruh *risk management committee* dan struktur *good corporate governance* terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

A. Bagi Penulis

1. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Good Corporate Governance*, *Risk Management Committee*, dan *Enterprise Risk Management*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta situs-situs resmi Perusahaan Sektor Manufaktur periode 2017-2019. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 hingga penelitian selesai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Risk Management Committee*

2.1.1.1 Pengertian *Risk Management Committee*

Risk Management Committee atau komite manajemen risiko merupakan organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan, serta tugas dan fungsi *Risk Management Committee* juga menetapkan kebijakan strategi untuk membantu dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi juga menilai toleransi risiko dari suatu perusahaan.

Desender (2007) menjelaskan bahwa *risk management committee* adalah komite yang terdiri dari komite-komite yang bertanggung jawab untuk menentukan strategi manajemen risiko, mengevaluasi operasi manajemen risiko, mengevaluasi laporan keuangan dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, *risk management committee* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komite manajemen risiko independen (independen) dan komite manajemen risiko gabungan (independen dari komite audit). *Risk*

management committee yang terpisah memiliki kualitas pengendalian internal yang lebih tinggi daripada komite manajemen risiko gabungan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa manajemen risiko perusahaan adalah proses mengidentifikasi, mengelola, dan memantau dalam proses meminimalkan risiko.

Subramaniam et al., (2009) menyatakan bahwa *Risk management committee* (RMC) merupakan mekanisme pengawas risiko yang penting bagi perusahaan. Dalam pembentukannya RMC dapat tergabung dengan audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. Komite terpisah yang secara khusus berfokus pada masalah risiko (RMC), dinilai dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal. RMC yang terpisah dari audit akan lebih mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan.

2.1.1.2 Pedoman Kerja *Risk Management Committee*

Menurut Subramaniam et al., (2009) menjelaskan luas area tanggung jawab dan wewenang dari *risk management committee* adalah sebagai berikut :

1. Menentukan strategi manajemen risiko organisasi.
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi.
3. Evaluasi laporan keuangan organisasi.
4. Pastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan peraturan saat ini.

Berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.09/2008 menyebutkan bahwa *risk management committee* merupakan suatu komite yang bertugas sebagai berikut :

1. Pengawasan;
2. Menetapkan kebijakan;
3. Menetapkan strategi;
4. Menetapkan metodologi manajemen risiko.

2.1.2 Struktur *Good Corporate Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Zarkasyi (2008, 51) definisi *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“*Corporate Governance* adalah sistem dan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan direksi dan dewan direksi untuk menetapkan tujuan perusahaan”.

Menurut Forum *for Good Corporate Governance* Indonesia (2003, 1) definisi *Good Corporate* adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya, atau dengan kata lain, sistem regulasi dan mengontrol perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, dalam usahanya untuk mencapai tujuan

perusahaan. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005, 5-6) menjelaskan lima tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai.
3. Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik.
4. Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.
5. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan.

Dengan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manfaat langsung yang dirasakan oleh perusahaan adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kemampuan operasional perusahaan dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, meminimalkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta konflik kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong manajemen organisasi menjadi lebih demokratis (berpartisipasi dalam berbagai kepentingan), mengambil lebih banyak tanggung jawab (bertanggung jawab atas setiap tindakan), menjadi lebih transparan, dan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan keuntungan jangka panjang.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001, 11) menjelaskan manfaat pelaksanaan *good corporate governance* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006, 5) menjelaskan terdapat lima prinsip dalam *good corporate governance* yaitu sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Transparansi berarti keterbukaan materi dan informasi yang relevan, serta keterbukaan proses pengambilan keputusan. Perusahaan harus memberikan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Informasi yang diungkapkan terutama meliputi kondisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, kepemilikan dan hak pengelolaan. Tujuan pengungkapan adalah agar pemegang saham dan pihak lain dapat memahami status perusahaan, yang dapat meningkatkan nilai pemegang saham.
2. **Kemandirian (*Indenpency*)**
Kemandirian mengacu pada pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa berbenturan dengan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.
3. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Sistem pertanggungjawaban untuk memperjelas fungsi dan mengimplementasikan sistem pertanggungjawaban instansi perusahaan agar pengelolannya dapat berjalan dengan efektif. Jika prinsip akuntabilitas diterapkan secara efektif maka perusahaan akan terhindar dari masalah keagenan (konflik peran kepentingan). Perusahaan harus bertanggung jawab atas kinerjanya

sendiri secara transparan dan adil, karena kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya harus diperhatikan, dan perusahaan harus dikelola, diukur, dan sejalan dengan kepentingan perusahaan.

4. *Pertanggung jawaban (Responsibility)*
Tanggung jawab adalah mematuhi prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan. Regulasi yang berlaku mencakup regulasi yang terkait dengan masalah perpajakan, hubungan ketenagakerjaan-manajemen, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, standar pengupahan dan persaingan yang sehat. Manajer memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua tindakan perusahaan kepada pemangku kepentingan sebagai cara untuk mempercayai mereka.
5. *Kewajaran (Fairness)*
Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku. Dengan *fairness* diharapkan seluruh aset perusahaan dapat dikelola dengan baik dan hati-hati, sehingga kepentingan pemegang saham akan terlindungi secara adil (jujur dan *fair*). Perusahaan harus selalu berpijak pada prinsip kewajaran dan ketidakberpihakan para pemangku kepentingan, serta memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan setiap orang yang terlibat.

2.1.2.4 Unsur dan Aspek *Good Corporate Governance*

Menurut *United Nation Development Programme* (2014) menjelaskan *good corporate governance* terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. *Participation.*
Mengarah pada jaminan keterlibatan bahwa setiap warga negara dalam pembuatan suatu keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi atau institusi yang mewakili kepentingannya. Hal ini dibangun atas dasar demokrasi dan partisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law.*
Bahwa hukum harus mencerminkan nilai keadilan dan kesamaan setiap orang didepan hukum serta dilakukannya *law enforcement* dan hak asasi manusia.
3. *Transparency* (Transparansi).
Hal ini dibangun atas dasar kebebasan informasi dimana proses, lembaga, dan informasi dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Setiap informasi tersebut harus bersifat komunikatif, dapat dipahami dan dimonitor.
4. *Responsiveness.*

Bahwa setiap proses dan kelembagaan yang ada harus dapat melayani setiap *stakeholders*.

5. *Consensus Orientation*.

Hal ini menyelesaikan bahwa prinsip *corporate governance* menjadi mediasi antara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam setiap kebijakan maupun prosedur.

6. *Equity*.

Bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan.

7. *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi).

Adanya jaminan bahwa setiap proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

8. *Accountability* (Akuntabilitas).

Bahwa pengambil keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat mesti bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.

9. *Strategic Vision*.

Pimpinan suatu perusahaan harus berlandaskan perspektif *corporate governance*.

Menurut Sutedi (2011, 7) menjelaskan aspek-aspek yang harus dijalankan dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *Corporate Governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu :
 - a. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode Pendaftaran kepemilikan;
 - b. Hak untuk mengalihkan dan memindah-tangankan kepemilikan saham;
 - c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
 - d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*).
Kerangka yang ditetapkan dalam tata kelola perusahaan harus memastikan perlakuan yang sama dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini melarang perdagangan

berdasarkan informasi orang dalam (perdagangan internal) dan perdagangan dengan diri sendiri. Selain itu, prinsip ini mensyaratkan anggota Komite Komisaris untuk bersikap transparan dalam menemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).

Kerangka kerja yang ditetapkan dalam tata kelola perusahaan harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana diatur oleh undang-undang dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan kelangsungan usaha (*continuous attention*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Kerangka kerja yang ditetapkan dalam tata kelola perusahaan harus memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dari setiap masalah yang terkait dengan perusahaan. Pengungkapan mencakup informasi tentang status keuangan, kinerja, kepemilikan, dan manajemen perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, ditinjau dan ditampilkan sesuai dengan standar kualitas tinggi. Manajemen juga meminta auditor eksternal (KAP) untuk melakukan audit independen atas laporan keuangan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).

Kerangka kerja yang ditetapkan dalam tata kelola perusahaan harus memastikan adanya pedoman strategis perusahaan dan pengawasan manajemen yang efektif oleh direksi dan pemegang saham perusahaan. Prinsip ini juga mencakup kekuasaan dan kewajiban profesional direksi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.2.5 Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 definisi dewan komisaris adalah sebagai berikut : Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006, 17) definisi dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Dewan komisaris merupakan bagian dari organisasi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab dan tanggung jawab untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan GCG, namun direksi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada direksi untuk memastikan perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan manajemen, keseluruhan manajemen perusahaan dan bisnis perusahaan oleh direksi, dan memberikan nasihat kepada dewan direksi, termasuk mengawasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, sebagai serta anggaran dasar perusahaan dan keputusan rapat bagi pemegang saham biasa, dan berlaku. Peraturan perundang-undangan membawa manfaat bagi perusahaan dan sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

2.1.2.6 Dewan Direksi

Menurut Warsono et.al. (2010, 55) menjelaskan pengertian dewan direksi sebagai berikut : Dewan direksi adalah organ perusahaan yang memiliki fungsi utama memberi perhatian secara bertanggung jawab terhadap penenerapan *corporate governance* dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Tri Hendro dan Conny (2014, 95) dewan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan, yaitu :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
2. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
8. Direksi tidak mnegggunakan penasehat perorangan atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

Menurut Tri Hendro dan Conny (2014, 95) kriteria, komposisi dan independensi Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggotadireksi telah berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian atau pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nasional atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali Bank Syariah (minimal 2 tahun).
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.
6. Anggota direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
7. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat dewan komisaris.
8. Mayoritas anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota dewan komisaris.
9. Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.

2.1.2.7 Konsentrasi Kepemilikan

Menurut Nuryaman (2009) menjelaskan kepemilikan terkonsentrasi sebagai berikut :

“Konsentrasi kepemilikan merupakan fenomena umum di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi seperti Indonesia dan negara-negara Eropa kontinental. Sebaliknya, di negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, struktur kepemilikan relatif sangat umum. Apabila sebagian besar saham dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok, maka kepemilikan saham tersebut dianggap terkonsentrasi, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya”.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko, salah satunya adalah dengan memastikan bahwa suatu perusahaan memiliki pemegang saham utama dan minimal satu pemegang saham utama. Struktur kepemilikan dibagi

menjadi dua bagian, yaitu kepemilikan blok eksternal dan kepemilikan blok internal atau kepemilikan blok manajemen.

Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam Feby dan Indah (2016) menjelaskan pengaruh konsentrasi kepemilikan sebagai berikut :

“Jika saham lebih banyak dipegang oleh pemelikan eksternal, maka pihak perusahaan dituntut untuk memberikan laporan yang transparan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap investor. Adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan erusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan”.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Feby dan Indah (2016) definisi kepemilikan saham publik adalah sebagai berikut :

“Jenis kepemilikan saham publik adalah rasio jumlah pemegang saham publik dengan jumlah pemegang saham yang dimiliki oleh perusahaan. Struktur kepemilikan publik juga berdampak positif terhadap pengungkapan risiko, karena jika saham perusahaan lebih banyak dikuasai oleh investor eksternal daripada investor internal, maka investor eksternal akan mendesak perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang luas”.

Menurut teori *stakeholder*, manajemen sangat mengedepankan pandangan para *stakeholdernya*, sehingga permintaan para *stakeholder* akan pengungkapan yang lebih luas menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi khususnya informasi mengenai risiko secara transparan dan lengkap. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan para *stakeholder*.

2.1.3 Enterprise Risk Management (ISO 31000)

2.1.3.1 Pengertian Enterprise Risk Management

Menurut Lam (2007, 53) definisi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

“Manajemen risiko korporasi atau ERM adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integrative untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan”.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014, 3) definisi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

“Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha”.

Menurut Hubbard (2009, 4) definisi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

“Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko yang diikuti oleh koordinasi dan aplikasi sumber daya ekonomi untuk meminimalkan, memantau dan mengawasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan manajemen risiko adalah prosedur atau kerangka kerja yang terdiri dari proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko yang digunakan untuk mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

2.1.3.2 Tujuan Enterprise Risk Management

Menurut Pribadi (2015) dalam Pratiwi (2019) menjelaskan tujuan penerapan manajemen risiko perusahaan diyakini mampu untuk :

1. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.

2. Memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya.
4. Membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi proses bisnis di unit kerja.
5. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukum.

2.1.3.3 Manfaat *Enterprise Risk Management*

Menurut Darmawi (2016, 5) menjelaskan tiga manfaat utama *Enterprise Risk Management* adalah :

1. **Memperbaiki Keefektifan Organisasi.**
Sebagian besar perusahaan sudah memiliki manajemen risiko dan fungsi lainnya, seperti keuangan, asuransi, audit, dan kepatuhan. Jika fungsi ERM ditetapkan dan chief risk officer (CRO) ditunjuk, koordinasi top-down yang diperlukan akan dibuat dan fungsi ini akan bekerja secara efektif.
2. **Melaporkan Risiko yang lebih baik.**
Salah satu persyaratan terpenting dari manajemen risiko adalah melaporkan risiko kepada manajemen senior dan dewan direksi. Dalam hal kerugian total, pengecualian diskresioner, peristiwa risiko, risiko utama, dan indikator peringatan dini lainnya, laporan akan segera tiba.
3. **Memperbaiki Kinerja Bisnis.**
Perusahaan yang menggunakan metodologi ERM mengalami peningkatan kinerja bisnis yang signifikan. Manajemen risiko dengan memperdagangkan semua portofolio berisiko, hubungan antara manajemen risiko dan manajemen modal dan tingkat keuntungan, dan strategi transfer risiko yang wajar dapat menghasilkan perbaikan ini.

2.1.3.4 Komponen *Enterprise Risk Management*

Menurut Darmawi (2016, 176) menjelaskan suatu program yang berhasil dari

Enterprise Risk Management, dapat dipecah kedalam tujuh komponen pokok, yaitu :

1. *Corporate governance* untuk menjamin bahwa dewan direksi dalam manajemen telah membangun proses keorganisasian yang memadai dan kontrol perusahaan untuk mengukur dan memanajementi risiko dalam perusahaan.
2. Manajemen lini untuk mengintegrasikan manajemen risiko kedalam kegiatan penciptaan penghasilan, yang meliputi pengembangan bisnis, produk dan hubungan manajemen dan perantara harga.
3. Portofolio manajemen untuk menggabungkan *exposure* risiko, menggabungkan pengaruh diversifikasi, dan monitoring konsentrasi risiko terhadap limit yang ditetapkan.
4. Mengalihkan risiko untuk *exposure* risiko yang terlalu tinggi.
5. Analitik risiko untuk menyediakan pengukuran risiko, analisis, dan alat pelaporan untuk kuantitas *exposure* risiko perusahaan.
6. Sumber data dan teknologi untuk menyokong proses analitik dan pembuatan laporan.
7. *Stakeholder management* untuk mengkomunikasikan dan melaporkan informasi risiko perusahaan kepada *stakeholder* utama.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pratiwi, 2019	PENGARUH <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017) – Pratiwi Ismi Giarti, 2019	a. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> . b. Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .

Lanjutan Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Denia, 2019.	PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN <i>RISK MANAGEMENT COMMITTEE</i> TERHADAP PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i>	<p>a. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan pada pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. <i>risk management committee</i> berpengaruh signifikan pada pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>
3	Ali, 2019.	PENGARUH STRUKTUR <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DALAM PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar pada BEI Periode 2015-2017)	<p>a. <i>Risk management committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>
4	Indah, 2016.	PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> , DAN UKURAN PERUSAHAAN, TERHADAP PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i>	<p>a. <i>Risk management committee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>

Lanjutan Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Jetmi, 2019.	PENGARUH DEWAN KOMISARIS, <i>LEVERAGE</i> , DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i> (ERM)	<p>a. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>
6	Gissel, 2017.	PENGARUH <i>CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE</i> DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN PADA PENGUNGKAPAN <i>ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</i>	<p>a. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. <i>Risk management committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>c. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>
7	Bates, 2009.	<i>Boards of Directors and Risk Committees.</i>	<p>a. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. <i>Risk management committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>

Lanjutan Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8	KNKG, 2006.	Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia	<p>a. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>c. Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>d. <i>Risk management committee</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>
9	Andari, 2018.	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, dan <i>Chief Officer</i> terhadap Penerapan <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016).	<p>a. <i>Risk management committee</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>

Lanjutan Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10	Hasina, 2018.	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi pada Sektor Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016).	a. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .
11	Desender, 2007.	<i>On The Determinants of Enterprise Risk Management Implementation.</i>	a. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .
12	Karina, 2015.	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> dan konsentrasi kepemilikan terhadap implementasi <i>enterprise risk management</i> .	<p>a. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. <i>Risk management committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>c. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>
13	Beasley, 2005.	<i>Enterprise Risk Management: An Empirical Analysis of Factors Associated with the Extent of Implementation.</i>	a. Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .

Lanjutan Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
14	Golshan, 2012.	<i>What Leads Firms to Enterprise Risk Management Adoption?.</i>	a. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .
15	Mokhtar, 2013.	<i>Competition, corporate governance, ownership structure and risk reporting.</i>	a. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .
16	Pribadi, 2015.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Pada Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang <i>Listing</i> di BEI Tahun 2013).	a. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .
17	Rustiarini, 2012.	<i>Corporate Governance, Konsentrasi Kepemilikan, dan Pengungkapan Enterprise Risk Management.</i>	<p>a. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>b. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p> <p>c. <i>Risk management committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>.</p>

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Menurut Bates and Leclerc (2009) pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah sebagai berikut :

“Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan komite audit maupun komite lainnya, atau menjadi komite yang terpisah dan berfokus pada masalah risiko. Perusahaan yang memiliki RMC dapat lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dan menyelesaikan berbagai risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh perusahaan, sehingga pengungkapan *enterprise risk management* dalam suatu perusahaan menjadi lebih luas”.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah sebagai berikut :

“*Risk Management Committee* adalah organ dewan komisaris yang membantu melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko sehingga *Enterprise Risk Management* dapat diungkapkan dan dilaksanakan secara luas dalam perusahaan”.

Menurut Hartantri Wahyu Andari (2018) pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah sebagai berikut :

“Jika dalam suatu perusahaan terdapat *risk management committee*, maka perusahaan dianggap mampu dan menerapkan *enterprise risk management*. Kunci sukses penerapan *enterprise risk management* yang baik adalah dengan adanya *risk management committee*”.

Penelitian Gissel (2017), Ali (2019), dan Denia (2019) menunjukkan bahwa keberadaan *Risk Management Committee* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Namun menurut penelitian Indah (2016) keberadaan *Risk Management Committee* berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, hal ini disebabkan karena belum ada aturan yang mewajibkan keberadaan RMC pada perusahaan sektor industri dan masih bersifat sukarela. Perusahaan dengan *Risk Management Committee* memiliki pemantauan kinerja dan penilaian risiko yang lebih terstruktur, sehingga dapat melakukan penilaian risiko secara mendalam. Keberadaan *Risk Management Committee* dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pemantauan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *Enterprise Risk Management* yang luas.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Menurut Hasina et al., (2018) pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

“Dewan komisaris mampu untuk mengawasi penerapan *enterprise risk management* dan memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih efektif untuk mengawasi sehingga pengungkapan *enterprise risk management* pun akan lebih baik dan lebih luas”.

Menurut Desender (2007) pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

“Jumlah anggota dewan komisaris yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas *enterprise risk management*. Meskipun *enterprise risk management* merupakan tanggungjawab manajemen, namun dewan komisaris perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan *enterprise risk management*”.

Menurut Hana Karina (2015) menjelaskan pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

“Suatu perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris yang tepat maka akan dapat mengurangi pengaruh manajemen yang bersifat melihat keberadaan peluang untuk melakukan kecurangan. Sehingga dewan komisaris dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan dapat meningkatkan pengungkapan *enterprise risk management*. Jumlah dewan komisaris yang besar memiliki kemampuan lebih untuk memberikan pengawasan dalam praktik pengungkapan risiko”.

Penelitian Denia (2019) dan Jetmi (2019) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Namun menurut penelitian Gissel (2017) ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*, hal ini disebabkan karena naik turunnya proporsi dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan ERM yang dilakukan. Karena terdapat perbedaan kesimpulan yang dipaparkan, berarti perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan dewan komisaris bertugas untuk mengawasi penerapan *enterprise risk management*. Namun, ukuran dewan komisaris itu sendiri berpengaruh dalam kualitas pengungkapan *enterprise risk management* karena perlunya waktu serta kesepakatan dalam menentukan keputusan manajemen risiko selanjutnya.

2.2.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Menurut Beasley (2005) menjelaskan pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

“Penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi akan memberikan dampak positif pada tahap penerapan manajemen risiko perusahaan antar perusahaan. Semakin banyak direksi, maka perusahaan semakin cenderung mengungkapkan *enterprise risk management* yang artinya dewan direksi berpengaruh positif terhadap penerapan *enterprise risk management* di dalam perusahaan. Semakin banyak dewan direksi maka semakin besar pula keharusan perusahaan yang menerapkan *enterprise risk management*”.

Menurut Golshan (2012) menjelaskan pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

“Dewan direksi memiliki dependensi dari CEO yang memiliki kekuasaan yang besar. Semakin besar ukuran dewan direksi, maka perusahaan semakin perlu untuk menerapkan *enterprise risk management*”.

Menurut Mokhtar dan Mellet (2013) menjelaskan pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

“Perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi yang kecil akan mengalami kekurangan dalam sisi pengalaman. Hal ini akan mengakibatkan biaya agensi yang tinggi karena CEO akan lebih banyak mengambil peran dan mendominasi pada setiap aktivitas perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki dewan direksi dengan ukuran besar akan memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih sehingga akan lebih dapat mengelola risikonya dengan baik yang berujung pada pengungkapan *enterprise risk management* menjadi lebih luas dari sebelumnya”.

Menurut penelitian Pratiwi (2019) ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Namun menurut penelitian Ali (2019) ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, hal ini disebabkan karena naik turunnya proporsi dewan direksi tidak mempengaruhi luas pengungkapan ERM yang dilakukan. Karena terdapat perbedaan kesimpulan yang dipaparkan, berarti diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek dari ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi, maka perusahaan semakin perlu menerapkan *enterprise risk management* dengan pengungkapan yang semakin luas pula.

2.2.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Menurut Agista dan Mimba (2017) menjelaskan pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

“Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, semakin besar tuntutan pada perusahaan untuk mengidentifikasi dan mitigasi pada risiko yang akan dihadapi perusahaan. Perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan cenderung melakukan pengungkapan *enterprise risk management* yang lebih luas pula”.

Menurut Pribadi (2015) menjelaskan pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

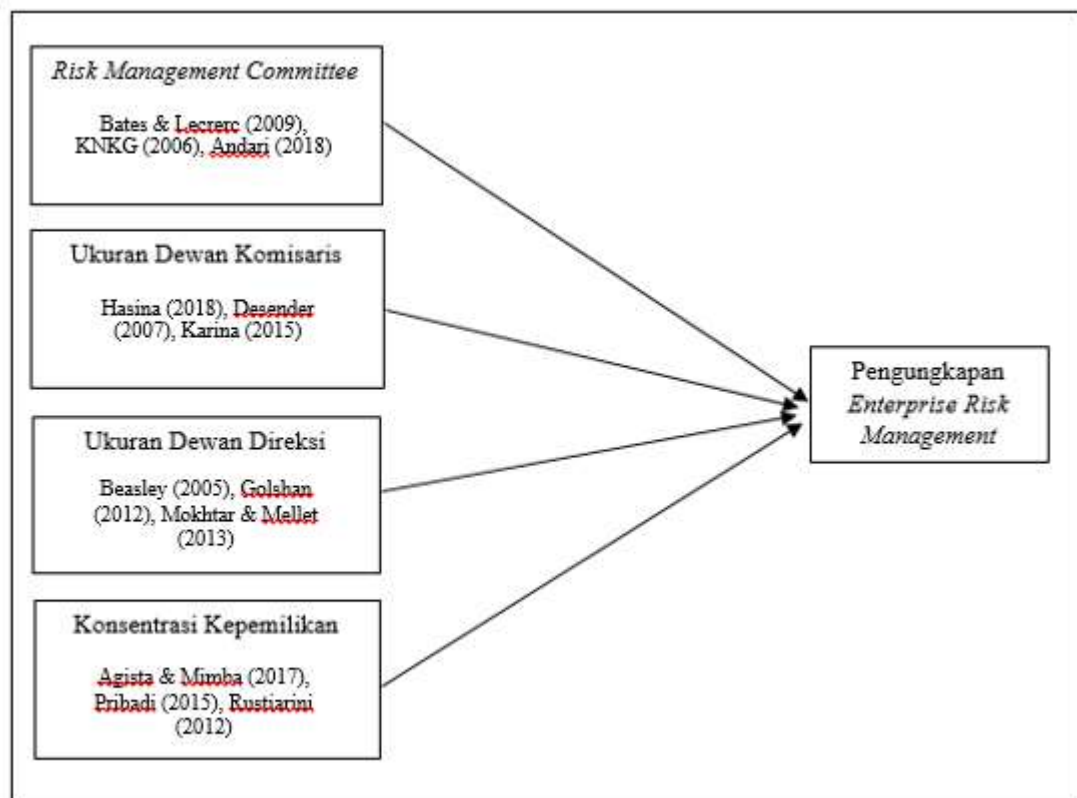
“Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan saham dalam kelompok atau individu maka semakin besar pula *enterprise risk management* yang akan diungkapkan perusahaan. Pasalnya, kepemilikan saham yang terpusat dapat memberikan tekanan kepada perusahaan, dan tekanan ini terjadi karena melindungi investasi saham yang dimilikinya”.

Menurut Rustiarini (2012) menjelaskan pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management* adalah sebagai berikut :

“Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan dalam suatu perusahaan, maka semakin kuat tuntutan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi, mulai dari risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi, risiko peraturan dan hukum, serta risiko informasi. Dengan demikian maka perusahaan perlu melakukan pengungkapan *enterprise risk management* yang lebih luas”.

Menurut penelitian Indah (2016), Gissel (2017), dan Pratiwi (2019) konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Namun, berdasarkan penelitian Jetmi (2019) konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*, hal ini disebabkan oleh dengan adanya konsentrasi kepemilikan, pengawasan dalam perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut. Karena perbedaan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : “Pengaruh *Risk Management Committee* dan Struktur *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*”. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 = Terdapat pengaruh *risk management committee* terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Hipotesis 2 = Terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Hipotesis 3 = Terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Hipotesis 4 = Terdapat pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atau solusi atas masalah yang akan dikaji, dianalisis, dan dibuktikan secara objektif.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010, 29) menjelaskan objek penelitian sebagai berikut : Objek penelitian adalah faktor atau titik atensi dari sebuah penelitian, sementara subjek penelitian adalah lokasi faktor melekat.

Menurut Iwan Satibi (2011, 74) definisi objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Secara garis besar obyek penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan lingkungan penelitian, yang menjadi tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang sifat, struktur, sejarah, dan fungsi lingkungan penelitian”.

Menurut Sugiyono (2017, 38) definisi objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Objek penelitian adalah segala sesuatu dalam bentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti yang kemudian dipelajari untuk diperoleh informasi tentang objek tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan memetakan sebuah lingkungan, untuk mendapatkan gambaran umum secara luas yang terdiri dari sifat lingkungan, struktur, sejarah dan fungsi dari lingkungan penelitian tersebut. Kemudian dipelajari sehingga diperoleh informasi untuk ditarik kesimpulannya.

Adapun lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai *risk management committee*, struktur *good corporate governance*, dan pengungkapan *enterprise risk management*. Objek penelitian ini akan dilaksanakan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

3.1.2 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran fakta yang diteliti dan metode pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Sugiyono (2017, 5) mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut :

“Metode penelitian merupakan suatu metode ilmiah untuk memperoleh data yang efektif yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan memprediksi suatu masalah”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dengan variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017, 147) definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum”.

Berdasarkan definisi diatas, maka metode deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama sampai kelima karena pada rumusan masalah tersebut hanya mendeskripsikan data tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

Menurut Sugiyono (2017, 08) mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai berikut :

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan”.

Menurut Moch. Nazir (2011, 91) definisi metode verifikatif adalah sebagai berikut :

“Metode verifikatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis melalui perhitungan statistik, sehingga diperoleh hasil bukti yang menunjukkan bahwa hipotesis ditolak atau diterima”.

Berdasarkan kedua definisi diatas, maka metode verifikatif-kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah keenam sampai kesembilan karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya. Serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari hipotesis yang diajukan serta hubungannya dengan variabel yang diteliti.

Hasil penelitian ini merupakan pengujian dari teori dan hipotesis melalui perhitungan statistik dengan melakukan pengukuran secara linier serta menjelaskan hubungan kausal antara variabel, dimana hasil yang akan keluar adalah diterima atau ditolak.

3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian, terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum dimulainya penelitian.

Menurut Sugiyono (2017, 38) definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

“Variabel penelitian adalah atribut, sifat, atau nilai orang, objek, atau aktivitas yang mempunyai variasi tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari guna memperoleh informasi tentangnya, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis variabel. Yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel tetap (variabel dependen).

3.2.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017, 39) definisi variabel independen adalah sebagai berikut : Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat).

Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah *Risk Management Committee* (X1), Ukuran Dewan Komisaris (X2), Ukuran Dewan Direksi (X3), dan Konsentrasi Kepemilikan (X4).

1. *Risk Management Committee*

Subramaniam (2009) menyebutkan bahwa ukuran yang digunakan dalam variabel ini adalah menggunakan variabel *dummy*. Yaitu apabila perusahaan memiliki *Risk Management Committee* yang terpisah dari komite audit atau berdiri sendiri maka diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang memiliki *Risk Management Committee* yang tergabung dengan komite audit maupun komite lainnya diberikan nilai 0.

2. Struktur *Good Corporate Governance*

a. Ukuran Dewan Komisaris

Dalam peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 menyebutkan dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan nanggaran dasar dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang ada dalam satu organisasi.

b. Ukuran Dewan Direksi

Dalam Subramaniam (2009) menyebutkan bahwa ukuran dewan direksi adalah jumlah seluruh anggota dewan direksi yang ada dalam suatu organisasi.

c. Konsentrasi Kepemilikan

Dalam penelitian Pratiwi (2019), peneliti menyebutkan konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan. Variabel konsentrasi kepemilikan dapat diukur menggunakan rumus berikut :

$$CONOWN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Total Saham Perusahaan}}$$

3.2.3 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017, 39) definsi variabel dependen adalah sebagai berikut :

“Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yang diteliti adalah Pengungkapan *Enterprise Risk Management*”.

Dalam Desender (2007) menjelaskan *Framework* ERM sebagai berikut :

“Berdasarkan ERM *Framework* yang dikeluarkan COSO, terdapat 108 item pengungkapan ERM yang mencakup delapan dimensi yaitu, lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respon atas risiko, kegiatan pengawasan, informasi dan komunikasi dan pemantauan”.

Setiap item ERM yang diungkapkan diberi nilai 1 dan apabila tidak diungkapkan nilai 0. Setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh indeks ERM setiap perusahaan. Variabel ERM dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$ERM = \frac{\text{Total Item yang Diungkapkan}}{108}$$

3.2.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk mendeskripsikan variabel penelitian sebagai konsep, dimensi, indikator, dan skala variabel yang terkait dengan penelitian sehingga alat statistik dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan benar. Untuk menguji, variabel bebas (variabel bebas) dan variabel terikat (variabel terikat) perlu diubah menjadi indikator variabel terkait agar dapat diukur dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, tujuannya adalah untuk mendorong pemahaman dan menghindari perbedaan konseptual dalam penelitian ini. Berikut adalah operasionalisasi variabel dalam penelitian ini :

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel (X1) : *Risk Management Committee*

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<i>Risk Management Committee</i>	Organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen	Variabel <i>dummy</i> diberi angka 1 jika RMC terpisah dari komite audit atau berdiri sendiri, atau diberi angka 0 jika RMC	Nominal

	risiko pada perusahaan (KNKG, 2011)	tergabung dengan komite audit maupun komite lainnya	
--	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel (X2) : Ukuran Dewan Komisaris

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Ukuran Dewan Komisaris	Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.	Total anggota dewan komisaris perusahaan.	Rasio

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel (X3) : Ukuran Dewan Direksi

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Ukuran Dewan Direksi	Dewan direksi adalah sekumpulan eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengawasan aktivitas presiden dan manajer-manajer tingkat atas perusahaan.	Total anggota dewan direksi perusahaan.	Rasio

Tabel 3.4

Operasionalisasi Variabel (X4) : Konsentrasi Kepemilikan

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Konsentrasi Kepemilikan	Konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan.	$CONOWN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Total Saham Perusahaan}}$	Rasio

Tabel 3.5

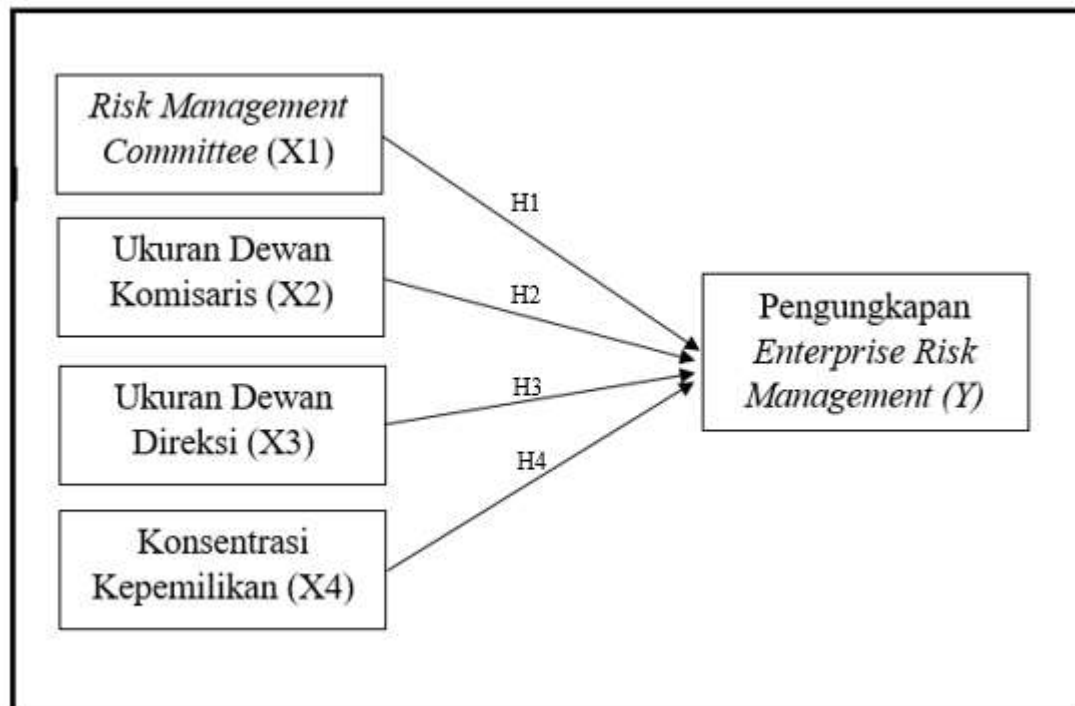
Operasionalisasi Variabel (Y) : Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengungkapan <i>Enterprise Risk Managemet</i>	<i>Enterprise Risk Management</i> adalah serangkaian metodologi dan	$ERM = \frac{\text{Total Item yang Diungkapkan}}{108}$	Rasio

	<p>prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3.2.5 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan akan diteliti. Dalam penelitian ini, sesuai dengan judul yang dikemukakan, oleh penulis yaitu “Pengaruh *Risk Management Committee* dan Struktur *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*”. Maka untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen penulis memberikan model penelitian yang dinyatakan sebagai berikut :



Gambar 3.1

Model Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017, 80) defnisi populasi adalah sebagai berikut :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Jumlah populasi adalah sebanyak 182

perusahaan dan tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

3.3.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017, 81) definisi teknik sampling adalah sebagai berikut :

“Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan”.

Menurut Sugiyono (2017, 82), terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan yaitu:

1. *Probability Sampling*.
Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster)*.
2. *Non Probability Sampling*
Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling sistematis*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *jenuh*, *snowball*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lebih tepatnya menggunakan teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2017, 85) definisi *purposive sampling* adalah sebagai berikut :

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan penggunaan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria penulis. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak delisting atau IPO selama periode 2017-2019.

3.3.3 Sampel

Menurut Sugiyono (2017, 81) definisi sampel adalah sebagai berikut :

“Sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristiknya. Pengukuran sampel merupakan langkah penentuan besar kecilnya sampel yang diambil pada saat mempelajari suatu benda. Penentuan besar sampel dapat dilakukan melalui statistik atau berdasarkan perkiraan penelitian. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa untuk mendapatkan sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau menggambarkan situasi populasi yang sebenarnya, dengan kata lain harus representatif”.

Tabel 3.6

Tahap Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.	182
Pengurangan Sampel Kriteria 1 : Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak delisting atau IPO selama periode 2017-2019.	(38)

Jumlah perusahaan yang dapat menjadi sampel sesuai seleksi kriteria :	144
Jumlah data yang diteliti (144 perusahaan x 3 tahun)	432

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dapat dilihat pada lampiran 2.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017, 39) sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Sumber primer.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data.
2. Sumber sekunder.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian pihak lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari *annual report* perusahaan sektor manufaktur periode 2017-2019 pada website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber pengumpulan data untuk melakukan penelitian. Karena sumber data yang digunakan adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan. Data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis, dan diproses dengan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Dari gambaran objek tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017, 147) definisi analisis data adalah sebagai berikut :

“Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data dari semua responden. Kegiatan analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, membuat tabulasi data berdasarkan variabel dari semua responden, menyediakan data untuk setiap variabel penelitian, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan”.

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Analisis statistik digunakan untuk analisis teknis data dalam penelitian

kuantitatif. Analisis statistik adalah suatu metode pengolahan informasi data (informasi kuantitatif berkaitan dengan kuantitas, cara mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dengan tujuan menyajikan data dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami atau menjelaskan data yang diperoleh. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017, 206) definisi statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

“Statistik deskriptif adalah informasi statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang luas”.

Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai pengungkapan *enterprise risk management*, struktur *good corporate governance*, dan *risk management committee*. Penelitian menggunakan statisttik deskriptif yang terdiri dari rata-rata (mean), standar deviasi, minumum, dan maksimum. Umumnya statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data. Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah :

1. Pengungkapan *Enterprise Risk Management*
 - a. Menentukan item apa saja yang diungkapkan sesuai dengan item Pengungkapan *Enterprise Risk Management* dalam bentuk tabel.
 - b. Menentukan item mana saja yang diungkapkan selama periode pengamatan sesuai dengan dimensi pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

- c. Menentukan presentase pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan cara membagi total item yang diungkapkan dengan total item pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
- d. Menunjukkan jumlah kriteria yang terdiri dari 5 kriteria, yaitu sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik.
- e. Menentukan nilai maksimum, dan minimum.
- f. Menentukan jarak interval kelas yaitu dengan cara menghitung selisih nilai maksimum dan minimum lalu dibagi 5.
- g. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan untuk *Enterprise Risk Management*.

Tabel 3.7

Kriteria Penilaian *Enterprise Risk Management*

Interval	Kriteria
0% - 20%	Sangat Kurang
20,1% - 40%	Kurang
40,1% - 60%	Cukup
60,1% - 80%	Baik
80,1% - 100%	Sangat Baik

- h. Menarik kesimpulan atas hasil yang sudah diperoleh.

2. Struktur *Good Corporate Governance*

A. Dewan Komisaris

- a. Menentukan banyaknya dewan komisaris pada setiap perusahaan sesuai dengan periode pengamatan.
- b. Menentukan nilai rata-rata sesuai dengan periode pengamatan.
- c. Menentukan jumlah kriteria yang terdiri dari 5 kriteria, yaitu sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik.
- d. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum.
- e. Menentukan jarak interval kelas yaitu dengan cara menghitung selisih nilai maksimum dan minimum lalu dibagi 5.
- f. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan untuk Dewan Komisaris.

Tabel 3.8

Kriteria Penilaian Dewan Komisaris

Interval	Kriteria
2,0 – 3,8	Sangat Kurang
3,9 – 5,7	Kurang
5,8 – 7,6	Cukup
7,7 – 9,5	Baik
9,6 – 11,0	Sangat Baik

- g. Menarik kesimpulan atas hasil yang sudah diperoleh.

B. Dewan Direksi

- a. Menentukan banyaknya dewan direksi pada setiap perusahaan sesuai dengan periode pengamatan.

- b. Menentukan nilai rata-rata sesuai dengan periode pengamatan.
- c. Menentukan jumlah kriteria yang terdiri dari 5 kriteria, yaitu sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik.
- d. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum.
- e. Menentukan jarak interval kelas yaitu dengan cara menghitung selisih nilai maksimum dan minimum lalu dibagi 5.
- f. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan untuk Dewan Direksi.

Tabel 3.9

Kriteria Penilaian Dewan Direksi

Interval	Kriteria
2,0 – 4,2	Sangat Kurang
4,3 – 6,5	Kurang
6,6 – 8,7	Cukup
8,8 – 10,9	Baik
11,0 – 13,0	Sangat Baik

- g. Menarik kesimpulan atas hasil yang sudah diperoleh.

C. Konsentrasi Kepemilikan

- a. Menentukan kepemilikan saham terbesar pada setiap perusahaan sesuai dengan periode pengamatan.
- b. Menentukan nilai rata-rata sesuai dengan periode pengamatan.

- c. Menentukan jumlah kriteria yang terdiri dari 5 kriteria, yaitu sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik.
- d. Menentukan nilai maksimum dan minimum.
- e. Menentukan jarak interval kelas yaitu dengan cara menghitung selisih nilai maksimum dan minimum lalu dibagi 5.
- f. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan untuk Konsentrasi Kepemilikan.

Tabel 3.10

Kriteria Penilaian Konsentrasi Kepemilikan

Interval	Kriteria
0,075 – 0,25	Sangat Kurang
0,251 – 0,426	Kurang
0,427 – 0,602	Cukup
0,603 – 0,778	Baik
0,779 – 0,95	Sangat Baik

- g. Menarik kesimpulan atas hasil yang sudah diperoleh.

3. *Risk Management Committee.*

- a. Menentukan keberadaan *Risk Management Committee* yang terpisah dari komite lainnya pada setiap perusahaan sesuai dengan periode pengamatan.
- b. Menentukan nilai rata-rata sesuai dengan periode pengamatan.
- c. Menentukan jumlah kriteria yang terdiri dari 3 kriteria, yaitu kurang, cukup, dan baik.

- d. Menentukan nilai maksimum dan minimum.
- e. Menentukan jarak interval kelas yaitu dengan cara menghitung selisih nilai maksimum dan minimum lalu dibagi 3.
- f. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan untuk *Risk Management Committee*.

Tabel 3.11

Kriteria Penilaian *Risk Management Committee*

Interval	Kriteria
0 – 0,33	Kurang
0,34 – 0,67	Cukup
0,68 - 1	Baik

- g. Menarik kesimpulan atas hasil yang sudah diperoleh.

3.5.3 Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2017, 8) menjelaskan penelitian verifikatif sebagai berikut : Penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

A. Rancangan Analisis

Rancangan analisis statistik adalah analisis yang digunakan untuk membahas data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017, 16) definsi metode penelitian kuantitatif sebagai berikut :

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, biasanya teknik pengambilan sampel secara acak, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, analisis data secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan program *microsoft excel* dan *Statistic Program for Social Science* (SPSS). Kemudian hasil data tersebut selanjutnya diolah menggunakan analisis regresi linier berganda.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian Pratiwi (2019) menyebutkan uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian asumsi normalitas untuk menguji data variabel bebas dan variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametik. Pengujian normalitas data menggunakan *uji kolmogorov-smirnov on sampel test*.

Singgih Santoso (2013, 393) menyatakan dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Danang Sunyoto (2016, 87) uji multikolinearitas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ($X_1, 2, 3, \dots, n$) di mana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r).

Dalam Singgih Santoso (2013, 34) menjelaskan tujuan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

“Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinearitas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen”.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran *variance inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi Multikolinearitas.

Menurut Imam Ghozali (2013, 105) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam m . Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan terhadap pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas.

Untuk menguji heteroskedastisitas, dapat digunakan pola gambar *scatterplot*. Adapun pedoman yang kita gunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar *scatterplots*, dengan ketentuan :

- a. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
 - b. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
 - c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi.
 - d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.
4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan uji *Run Test*. Terdapat dua dasar dalam pengambilan keputusan uji *run test*, yaitu :

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0.05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0.05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

C. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Pengaruh *Risk Management Committee* dan Struktur *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* diuji menggunakan model penelitian sebagai berikut :

$$ERM = \alpha + \beta_1 RMC + \beta_2 BOC + \beta_3 BOD + \beta_4 CONOWN + e$$

Keterangan :

ERM = *Enterprise Risk Management*

α = Konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien Regresi

RMC = *Risk Management Committee*

BOC = Ukuran Dewan Komisaris

BOD = Ukuran Dewan Direksi

CONOWN = Konsentrasi Kepemilikan

e = Tingkat kesalahan penelitian (*error term*)

D. Analisis Korelasi

Menurut Sugiyono (2017, 183) korelasi parsial digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua hubungan variabel apabila data kedua variabel tersebut berbentuk interval atau rasio dan sumber kedua data tersebut sama. Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara kedua variabel yang diuji. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien Pearson Product Moment (r).

Pada dasarnya, nilai r yang didapatkan bervariasi dari -1 hingga $+1$, atau secara sistematis dapat dituliskan menjadi $-1 \leq r \leq +1$. Hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan tiga pedoman, yaitu:

- Bila $r = 0$ atau mendekati 0 , maka korelasi antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y .

- Bila $r = +1$ atau mendekati $+1$, maka korelasi antar kedua variabel dikatakan positif.
- Bila $r = -1$ atau mendekati -1 , maka korelasi antar kedua variabel dikatakan negatif.

Apabila r hitung berada dibawah r tabel atau r hitung $<$ r tabel, maka perlu diperhatikan pedoman yang dipaparkan seperti dibawah ini. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap besar kecil koefisien korelasi yang ditemukan, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini:

- Interval koefisien : 0,00 – 0,199 : Sangat Lemah
- Interval koefisien : 0,20 – 0,399 : Lemah
- Interval koefisien : 0,40 – 0,599 : Sedang
- Interval Koefisien : 0,60 – 0,799 : Kuat
- Interval koefisien : 0,80 – 1,000 : Sangat Kuat

E. Uji F

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan (Pratiwi, 2019).

Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya jika non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak apabila nilai signifikansi probabilitas pada hasil output analisis SPSS untuk uji F berada di atas 0,05 ($> 0,05$). Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- b. H_0 diterima apabila nilai signifikansi probabilitas pada hasil output analisis SPSS untuk uji F berada di bawah 0,05 ($< 0,05$). Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

F. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hal ini berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Pratiwi, 2019).

Dalam analisis koefisien determinasi, dilakukan pula analisis koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui apakah diantara dua variabel terdapat hubungan. Jika terdapat hubungan maka bagaimana arah hubungan tersebut untuk mengetahui ada tidaknya hubungan diantara dua variabel maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui derajat atau tingkat keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dari hasil perhitungan tersebut berlaku ketentuan, jika :

- a. Positif (+) : Menunjukkan hubungan yang searah antara kedua variabel.
- b. Negatif (-) : Menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara kedua variabel.

3.5.4 Uji Hipotesis

A. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Uji parsial dimaksudkan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam Uji T menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat kesalahan α sebesar 5%. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik SPSS.

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- a. H_a ditolak apabila signifikan t hitung $> 0,05$ artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- b. H_a diterima apabila signifikan t hitung $< 0,05$ artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

$H_{01}(\beta_1 = 0)$: *Risk Management Committee* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

$H_{a1}(\beta_1 \neq 0)$: *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

$H_{02}(\beta_2 = 0)$: Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

$H_{a2}(\beta_2 \neq 0)$: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

$H_{03}(\beta_3 = 0)$: Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

$H_{a3}(\beta_3 \neq 0)$: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

$H_{04}(\beta_4 = 0)$: Konsentrasi Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

$H_{a4}(\beta_4 \neq 0)$: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

